



No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
3	Membangun sinergi sekolah dengan keluarga dan menguatkan pendidikan budi pekerti dalam kurikulum sekolah serta mengintegrasikan pendidikan yang membangkitkan literasi, daya berpikir kritis-dialektis dan hasrat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi	Program Pengelolaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan pendidikan budi pekerti dalam pembelajaran tematik di sekolah; • Workshop untuk guru tentang metode pembelajaran berbasis nilai, dialog, dan pemberdayaan potensi siswa secara utuh (<i>cognitive, affective, psychomotor</i>). 	Pendidikan
4	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui ketrampilan dan penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan job fair; • Kegiatan <i>link and match</i> dengan dunia usaha; • Pelatihan bagi calon tenaga kerja; • Pelatihan manajemen usaha, akses modal, dan promosi digital bagi IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kerja • Perindustrian
5	Menguatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan hak anak serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; • Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan PPRG; • Penguatan P2TP2A; • Penguatan forum anak 	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
6	Melakukan pembinaan pemuda, remaja dan prestasi olahraga melalui penyediaan sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda • Pembangunan fasilitas olahraga di desa (satu desa minimal satu fasilitas olahraga) 	Kepemudaan dan Olah Raga
7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan sumber daya kesehatan, sarana dan prasarana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan; • Revitalisasi dan pemenuhan sarana prasarana puskesmas dan poyandu' • Satu desa satu ambulans; 	Kesehatan
8	Meningkatkan pelayanan medis Ibu Hamil dan melahirkan dan mencegah stunting dengan pemberian makanan bergizi (4 sehat 5 sempurna) dengan pangan lokal	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian makanan tambahan PMT bagi ibu hamil dan balita; • Pemberina edukasi gizi berbasis keluarga 	Kesehatan



No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
9	Mendorong dan memfasilitasi Program Keluarga Sehat dan Sejahtera melalui Program Pola Asuh sehat, pencegahan pernikahan dini, pembinaan keluarga sehat dan harmonis (pencegahan KDRT dan perceraian dini)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian penduduk • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); • Program Perlindungan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye pencegahan pernikahan dini (Genre); • Sosialisasi/ edukasi kepada masyarakat Pencegahan KDRT; • Penguatan P2TP2A 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
10	Membangun panti asuhan bagi anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak dengan gangguan mental, rumah jompo dan rumah singgah dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kaum lanjut usia melalui penyediaan sarana dan prasarana	Program Rehabilitasi Sosial;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan atau revitalisasi fasilitas panti/rusun sosial sesuai standart; • Pelatihan SDM pengasuh dan perawat sosial; • Penambahan ruang layanan kesehatan khusus lansia dan ABK (klinik geriatri dan klinik tumbuh kembang) di puskesmas strategis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial; • Kesehatan
11	Memfasilitasi RSUD untuk peningkatan pelayanan medis melalui peningkatan kualitas tenaga medis (dokter umum dan penambahan dokter spesialis dan perawat), peningkatan fasilitas peralatan medis, peningkatan kesejahteraan tenaga medis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutme dan distribusi dokter spesialis dan perawat; • Pelatihan dan workshop untuk dokter umum, perawat, dan nakes lainnya secara berkala; • Pengadaan fasilitas dan alat kesehatan modern. 	Kesehatan
II	Misi 2: Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana			
1	Mewujudkan manfaat Klaten sebagai kota antara, yang memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kawasan strategis di jalur utama Solo-Yogyakarta sebagai pusat layanan ekonomi, logistik, UMKM, dan pariwisata; • Revitalisasi kawasan sekitar stasiun (Klaten, Ceper, Delanggu); • Peningkatan kualitas jalan penghubung antar-kecamatan; • Penyediaan transportasi umum antarkota; • Penyediaan WiFi publik di titik transit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perhubungan; • Komunikasi dan Informatika



No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur tematik untuk mendukung pengembangan pariwisata, penguatan investasi, pengembangan UMKM, dan akses pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan atau penataan infrastruktur kawasan wisata unggulan (jalan akses, area parkir, signage, area UMKM, toilet, ruang publik terbuka); • Revitalisasi pasar tradisional; • Peningkatan kualitas jalan penghubung antar-kawasan wisata, industri kecil, dan pasar lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Perdagangan
3	Mengurangi kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Jalan; • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); • Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni; • Revitalisasi kawasan kumuh; • Pembangunan atau renovasi sekolah dan puskesmas di wilayah yang belum memiliki fasilitas atau mengalami kelebihan beban; • Peningkatan jalan antar kecamatan/ desa yang strategis untuk konektivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Perumahan Rakyat dan dan Kawasan Permukiman
4	Meningkatkan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi termasuk pengelolaan persampahan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; • Program Pengelolaan Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem jaringan air bersih melalui PDAM, sumur bor dalam, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) skala kecil, dan sambungan rumah tangga; • Pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) komunal dan sistem sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas); • Pembangunan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah; • Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Terintegrasi di sekolah, PKK, Karang Taruna dll.’ • Subsidi biaya pemasangan sambungan air rumah tangga (SR) dan pembangunan tangki septik individu bagi rumah tangga prasejahtera. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; • Lingkungan Hidup





No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta mitigasi dampak perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; • Program Pengelolaan Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Tanah; • Penanaman pohon di daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, dan lereng rawan longsor; • Pengembangan Kampung Iklim (ProKlim) dan Sekolah Adiwiyata; • Kegiatan penyuluhan untuk masyarakat, petani, pelajar, dan pelaku usaha mengenai efek perubahan iklim dan upaya mitigasinya; • Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), bank sampah, dan pelatihan ecobrick serta daur ulang limbah organik dan non-organik. 	Lingkungan Hidup
6	Menguatkan sarana dan prasarana kebencanaan, pelayanan informasi kebencanaan dan Peningkatan pelayanan penanganan bencana berbasis kalaborasi antar sektor	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; • Program Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Sarana dan Peralatan Penanggulangan Bencana; • Pemasangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System / EWS) pada wilayah rawan bencana; • Pelatihan Gabungan Penanggulangan Bencana Antar Sektor (BPBD, TNI, Polri, Dinkes, komunitas relawan, dinsos dan masyarakat); • Pembentukan dan pelatihan tim relawan siaga bencana berbasis desa/ kelurahan; • Simulasi evakuasi mandiri dan pelatihan dasar tanggap darurat di sekolah, kantor, dan komunitas; • Pembentukan forum koordinasi penanggulangan bencana lintas OPD, lintas wilayah, dan mitra swasta/LSM. 	Ketentraman dan ketertiban umum





No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
7	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan relawan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran; • Program Penanggulangan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Desa Tangguh Bencana; • Pelatihan dasar penanggulangan bencana bagi relawan dan masyarakat; • Pemasangan papan informasi jalur evakuasi di lokasi strategis seperti desa, sekolah, kantor, dan permukiman padat 	Ketentraman dan ketertiban umum
III	Misi 3: Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan			
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM); • Program Pengembangan UMKM; • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sentra UMKM dan Inkubasi Wirausaha Baru; • Pengembangan Kawasan Ekonomi Produktif (Desa/Kecamatan Tematik); • Pelatihan keterampilan teknis (las, menjahit, desain grafis, tata boga, digital marketing) bekerja sama dengan BLK, SMK, dan industri. Bagi calon tenaga kerja; • Promosi dan fasilitasi investasi daerah; • Digitalisasi UMKM dan Akses ke Platform E-commerce; • Event Tematik, Expo UMKM, dan Bazar Produk Lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perindustrian; • Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	Menjalankan program kerakyatan dengan meningkatkan keberpihakan kepada petani, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, buruh generasi muda dan remaja, serta optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyuluhan Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dan penguatan kapasitas petani; • Pelatihan pertanian ramah lingkungan, pertanian organik, dan sistem pertanian terpadu; • Pelatihan keterampilan kerja baru bagi buruh terdampak PHK atau pekerja informal (mekanik, las, katering, dll.); • Inkubasi bisnis kreatif dan startup pemuda berbasis potensi lokal (agribisnis, digital, fesyen, kuliner); • Optimalisasi Peran dan Usaha BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Tenaga kerja;





No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
3	Meningkatkan produktivitas daerah dan mempromosikan potensi kepada investor lokal, nasional dan global dan memberikan kemudahan investasi berbasis sumber daya lokal unggulan daerah yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Publikasi Profil Investasi Daerah (<i>Investment Profile & Opportunity Map</i>) • Penyelenggaraan Forum Investasi Daerah (<i>Regional Investment Forum</i>); • Promosi Digital Potensi Daerah Melalui Media Sosial dan Platform Global 	Penanaman Modal
IV	Misi 4: Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera)			
1	Mewujudkan <i>good and clean governance</i> melalui optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal, cepat, kreatif, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyelenggaraan Pengawasan; • Program Pelayanan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pendidikan anti korupsi; • Peningkatan kompetensi dan integritas ASN; • Pembentukan dan Penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP); • Penguatan sistem pengaduan dan aspirasi masyarakat berbasis teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan; • Penanaman Modal
2	Mengembangkan aparatur dan sistem pemerintahan yang dinamis melalui reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia; • Program Penyelenggaraan Pengawasan; • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Struktur Birokrasi; • Penguatan Manajemen ASN dan Budaya Kinerja; • Rekrutmen ASN berbasis kompetensi dan sistem merit. • Bimbingan Teknis ASN; • Penguatan peran Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan Pelatihan; • Pengawasan
3	Menguatkan integrasi pelayanan pemerintah daerah sampai ke desa	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Desa; • Program Administrasi Pemerintahan Desa; • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat • Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Forum Koordinasi dan Pendampingan Lintas Wilayah; • Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa; • Digitalisasi Layanan Administratif di Tingkat Desa; • Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah dengan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Sekretariat Daerah





No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pengawasan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; • Program Perekonomian dan Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan Musrenbang secara berjenjang dengan melibatkan aktif masyarakat, kelompok perempuan, pemuda, disabilitas, dan kelompok rentan; • Pembentukan dan Penguatan Forum Warga dan Lembaga Kemasyarakatan; • Penguatan Sistem Pengaduan Masyarakat yang Responsif dan Terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan; • Sekretariat Daerah
5	Mengoptimalkan kinerja keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Keuangan Daerah; • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara digital dan berkala. • Meningkatkan pendapatan dari sektor unggulan (pariwisata, parkir, pasar, pajak hotel/restoran, reklame, dll). • Penguatan sistem keuangan daerah berbasis teknologi (e-Budgeting, e-Planning, e-SAKIP, dan SIPD); • Pelatihan ASN pengelola keuangan ; • Efisiensi Belanja Daerah dan Penajaman Program Prioritas; • Penyelarasan prioritas daerah dengan program strategis nasional untuk memperoleh transfer pusat. 	Keuangan
6	Meningkatkan kapasitas desa dan memperkuat aparatur desa dalam tata kelola pemerintah desa yang baik dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Desa; • Program Administrasi Pemerintahan Desa; • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk kepala desa, perangkat desa, dan BPD tentang administrasi pemerintahan, keuangan, dan perencanaan Pembangunan; • Peningkatan Literasi Teknologi dan Administrasi Digital Desa; • Penguatan Fungsi Pengawasan Internal dan Partisipatif 	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa





No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
V	Misi 5: Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang smartcity			
1	Menguatkan ketahanan pangan dengan modernisasi pertanian, optimalisasi lahan, dan pengembangan bibit unggul daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; • Program Penyuluhan Pertanian • Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan subsidi alat mesin pertanian (alsintan); • Pelatihan petani dalam penggunaan teknologi pertanian presisi; • Pengembangan sistem irigasi modern; • Pengembangan pertanian lahan pekarangan dan urban farming berbasis komunitas; • Pengembangan dan penguatan bibit unggul lokal; • Penguatan kelembagaan petani dan koperasin tani; • Pembangunan lumbung pangan desa dan gudang penyimpanan hasil pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Ketahanan Pangan
2	Mengembangkan kawasan pariwisata, desa wisata, dan destinasi wisata berbasis potensi Lokal dan meningkatkan kemitraan antar pelaku industri pariwisata menuju Klaten menjadi daerah tujuan wisata yang unggul	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata 	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan pengelolaan desa wisata; • Pelatihan pemandu wisata ekowisata (desa wisata); • Pelatihan kuliner (higienitas sajian kuliner) bagi pelaku wisata di desa wisata 	Pariwisata
3	Meningkatkan penguasaan riset dan daya saing inovasi melalui kalaborasi dan sinergitas lintas sektor	Program Riset dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat inovasi dan teknologi daerah (innovation hub) untuk menampung ide dan produk inovatif. • Inkubasi startup lokal dan UMKM berbasis teknologi melalui pelatihan, mentoring, dan akses permodalan. • Lomba TTG tingkat desa dan kecamatan; • Lomba krenova • Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Komersialisasi Inovasi 	Penelitian dan Pengembangan





No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
4	Mengembangkan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city serta pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan internet berkecepatan di kawasan publik, perkantoran pemerintah, sekolah, dan desa. • Perluasan pemasangan Wi-Fi gratis di ruang publik strategis (alun-alun, terminal, taman kota, dll); • Penyediaan dan integrasi aplikasi layanan publik berbasis smart city 	1. Komunikasi dan Informatika
5	Mengimplementasikan sistem TIK terintegrasi dan terpadu berbasis data serta Akselerasi digitalisasi secara menyeluruh dan mudah diakses oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika; • Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jaringan internet berkualitas di kantor pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan desa; • Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); • Pelatihan bagi ASN dan perangkat desa tentang penggunaan aplikasi digital, pengelolaan data, dan keamanan siber; • Peningkatan Keamanan dan Tata Kelola TIK; • Kemitraan dengan penyedia layanan digital (platform cloud, jaringan internet, dan developer aplikasi lokal). 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi dan Informatika; • Persandian
VI	Misi 6: Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur			
1	Meningkatkan stabilitas sosial masyarakat yang berkarakter, beriman, toleran dan berbudaya serta meningkatkan kerukunan umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kemasyarakatan; • Sosialisasi dan pelatihan pendidikan karakter di sekolah dan komunitas pemuda; • Kampanye Toleransi dan Moderasi Beragama melalui Media Sosial dan Kegiatan Sosial; • Pemberdayaan seniman dan budayawan lokal untuk menyampaikan nilai persatuan dan kebhinekaan. 	Kesatuan Bangsa dan Politik



No	Misi/ Program strategis	Program Nomenkatur (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendri 3046 Tahun 2024)	Rencana Implementasi Kegiatan	Urusan
2	Mengembangkan kebudayaan, seni tradisi dan modern melalui penyediaan sarana dan prasarana, event, serta promosi kolaboratif	2. Program Pengembangan Kebudayaan 3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional; 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung kesenian, sanggar seni, balai budaya, dan galeri seni lokal; • Festival seni tradisional daerah (wayang, ketoprak, tari-tarian daerah, dll); • Gelar seni modern (musik kontemporer, seni rupa, teater modern) yang melibatkan generasi muda; • Pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan komunitas seni tradisi dan modern; • Promosi Budaya melalui Media Digital dan Kolaborasi Kreatif; • Kolaborasi event budaya dengan pelaku pariwisata, UMKM, dan sekolah/kampus; • Integrasi seni budaya lokal ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah; • Pendataan dan digitalisasi seni tradisi dan budaya lokal (baik benda maupun tak benda); • Publikasi buku, film dokumenter, dan katalog seni budaya Klaten; • Pengajuan seni budaya lokal sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) nasional. 	Kebudayaan





3.3.3. Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

Selain program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Klaten yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Klaten juga melaksanakan sejumlah program mandatory sebagai bentuk delegasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk di dalamnya dukungan terhadap program ketahanan pangan yang menjadi prioritas pembangunan provinsi secara berkelanjutan dan terpadu. Berikut dukungan Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap tiga puluh lima Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.7

Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya: Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center dengan memanfaatkan aset pemerintah kabupaten/ kota	Pelatihan tenaga kerja khusus disabilitas (ULD bidang tenaga kerja), penempatan tenaga kerja disabilitas di industri sesuai kriteria
2	Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni: Program “1 KK 1 rumah layak huni”, pengembangan pusat rekreasi, promosi membangun, dan gelanggang olahraga Internasional. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibagi menjadi 30 % kewenangan kabupaten/ kota dan 20 % desa	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi: Pelatihan berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum (Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK)	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi
4	Pelayanan Kesehatan: Layanan kesehatan keliling, puskesmas pembantu dan layanan kesehatan di setiap desa	Operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengembangan tambak Ikan nila	Penataan kelembagaan Pokdakan di kawasan Minapolitan dan kawasan sentra budidaya ikan melalui metode Smart Fisheries Village/ SFV (Kampung Budidaya), Menghidupkan kembali Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) sebagai upaya penataan kelembagaan kelompok perikanan di Kabupaten Klaten
6	Sekolah Unggulan: Mendorong sekolah unggulan di setiap kecamatan	Pembangunan SMA yang berlokasi di Kecamatan Kemalang oleh Provinsi Jawa Tengah
7	Rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas: Dibangun di setiap kecamatan	Implementasi Peraturan Bupati No 8 Tahun 2024 terkait pembentukan UPTD PPPA



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah
8	Pengembangan wisata: Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata: 1. Pelatihan pengelolaan desa wisata; 2. Pelatihan pemandu wisata ekowisata (desa wisata); 3. Pelatihan kuliner (higienitas sajian kuliner) bagi pelaku wisata di desa wisata
9	BUMDES Berdaya: Kepastian hukum dan bantuan modal usaha bagi setiap Bumdes di Jawa Tengah	Pengembangan BUMDES dan BUMDESMA
10	Penguatan BPBD dan Tagana: Untuk penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Operasional mobil dapur umum, penyediaan logistik kebencanaan, pelatihan mitigasi bencana, penanganan darurat bencana
11	Cek Kesehatan Gratis	Pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai); pengadaan alkes, pelayanan cek kesehatan gratis oleh puskesmas
12	Penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan di setiap Puskesmas Pembantu	Distribusi redistribusi tenaga kesehatan tenaga medis, pengadaan cpns/pppk, untuk ABK pengajuan rekomendasi unit pembina melalui aplikasi renbut.
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan serta profesionalitas ASN dan perangkat desa	Bimbingan Teknis ASN
14	Bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pendampingan hukum kepada Perangkat Daerah dan Desa
15	Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Optimalisasi dan pengembangan kawasan wisata Rowo Jombor, Geopark, Sport Center
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Bimbingan Sosial bagi anak rentan, Optimalisasi Peran Forum Anak
17	Ekosistem ekonomi syariah: Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Sosialisasi ekonomi syariah bagi masyarakat, fasilitasi kemudahan akses keuangan pada masyarakat (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi pendaftaran HAKI, P-IRT, sertifikat halal, sertifikasi ISO, Sertifikasi TKDN
19	Peningkatan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan untuk para jagal, juru sembelih halal (Juleha)
20	Desa maju dan berdaya: Pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan	Pembuatan dan penguatan lumbung pangan desa; Penguatan Tagana dan Relawan Bencana tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah
	go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan tim tanggap bencana	
21	Desa mandiri energi: Pengembangan bio gas, mikro hydro dan tenaga surya	-
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Penguatan dan fasilitasi kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan pemasaran digital bagi pengelola desa wisata
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM (1 RT 1 Kelompok UMKM)	Program Klaten Subsidi Bunga Ringan bagi UMKM, termasuk petani
25	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	Pengembangan bank sampah dan ekonomi sirkular
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	Mendorong pemenuhan PSU perumahan (salah satunya RTH), mendorong pembangunan dan pemeliharaan RTH sampai di tingkat desa
27	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	pemberdayaan PKUB (Paguyuban Kerukunan Umat dan Beragama) di Kecamatan dan desa oleh FKUB Kabupaten
28	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	pemberdayaan PKUB (Paguyuban Kerukunan Umat dan Beragama) di Kecamatan dan desa oleh FKUB Kabupaten; FPK belum terbentuk
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pelatihan kompetensi dasar bagi kader posyandu, pemberian apresiasi dengan lomba kader posyandu berprestasi, jambore kader
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Posyandu lansia, pelatihan car giver (pendamping lansia), puskesmas santun lansia
31	Taruna karya mandiri: Program Kartu Zilenial untuk membuka lapangan kerja	-
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	1. Pelatihan dasar akuntansi; 2. Pelatihan Manajemen perkoperasian; 3. Pelatihan dan uji kompetensi sertifikasi pengelola koperasi; 4. Pelatihan tata kelola koperasi dan pelatihan penilaian kesehatan koperasi; 5. Sosialisai pendirian Koperasi Desa Merah Putih
33	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	Penghargaan bagi insan olahraga berprestasi, pemberian pada Hibah KONI, NPC, KORMI
34	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Pembentukan ULD Bidang Pendidikan



No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Klaten Terhadap Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pemantauan gempa dan G merapi secara real time (ina tews; BMKG), Onlimo di Sungai dengkung (Cawas).

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3.4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Klaten Tahun 2025-2029 juga diarahkan berbasis pada pengarustamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Pemerintah Kabupaten Klaten memperkuat sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Sosial Kesehatan. Di sisi lain, intervensi tidak langsung dilakukan melalui optimalisasi pelayanan di Posyandu, Puskesmas, fasilitas pendidikan, serta program pemberian makanan tambahan. Pemerintah Kabupaten Klaten juga mengalokasikan dukungan APBD untuk menjangkau kelompok rentan yang belum terakomodasi dalam kuota APBN, guna memastikan prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas.

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Strategi ini difokuskan pada tiga ranah intervensi, yaitu:

- (1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program padat karya desa dan sektor produktif.
- (2) Peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi, melalui pelatihan, pendampingan, peningkatan akses modal, serta akses pasar yang menyasar individu, rumah tangga, dan komunitas.
- (3) Penguatan sarana dan ekosistem, dengan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi rakyat, penguatan kelembagaan lokal, dan pengembangan aset produktif.

3. Menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses





layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak, pemberian stimulan jamban serta penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti sinergitas dari dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan (verifikasi dan validasi database kemiskinan), dan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom-up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah diverifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan. Sedangkan untuk pendekatan kelompok difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala kemanfaatan yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kelompok antara lain: pengembangan potensi local melalui pemberdayaan kelompok usaha, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

3.3.5. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 pada lampiran IV terdapat arah pembangunan kewilayahan yang setidaknya terdapat 5 pembagian kawasan dengan total sejumlah 18 Kawasan yang berada di Jawa Tengah, yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan (8 Kawasan): Kawasan Perkotaan Purwokerto, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap, Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal- Semarang-Demak-Kudus, Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri





- Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo, Kawasan Pariwisata & Ekonomi Kreatif Unggulan Solo- Sragen-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Rembang;
2. Kawasan komoditas Unggulan (2 Kawasan) yaitu komoditas Tebu di Pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora, dan Sragen) dan Ekonomi Biru di Pati–Rembang, dan Cilacap;
 3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (4 Kawasan):
 - a. Swasembada Pangan dan Air: Pemali-Comal (Brebes, Kab. Tegal, Pemasang, Kab. Pekalongan dan Batang);
 - b. Swasembada Pangan, Air dan Energi: Dieng–Serayu–Bogowonto (Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo); Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juwana (Kab. Semarang, Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang, Grobogan); Bengawan Solo (Blora, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri).
 4. Kawasan Afirmasi (1 Kawasan): Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan);
 5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana (3 Kawasan): TN Merbabu-Merapi, TN Karimunjawa dan Geopark Kebumen.

Pembangunan wilayah Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 yang terbagi dalam sepuluh wilayah pengembangan diarahkan dengan kebijakan umum "Pengembangan Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Wilayah Pengembangan". Kebijakan tersebut juga dalam rangka untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah serta memberikan kontribusi untuk perwujudan Indonesia Emas 2045. Pengembangan episentrum pertumbuhan ekonomi baru Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan atau 10 titik aglomerasi Jawa Tengah merupakan implementasi atau penjabaran langsung dari RPJMD Tahun 2025-2029. Penjabaran pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui Pengembangan Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Wilayah Pengembangan (WP) meliputi Program Unggulan dan Program Strategis. Kabupaten Klaten masuk dalam WP Subosukowonosraten, dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Subosukowonosrten berikut adalah indikasi kebutuhan rencana program selama 5 tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut :

1. **Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (*Event Tourism*) dan Wisata Alam serta Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY**
 - a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - 1) Mendorong peningkatan status Bandara Adi Soemarmo menjadi bandara internasional (pengembangan sebagai bandara umrah dan haji) dan sebagai generator aktivitas perekonomian global;





- 2) Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol ruas Solo - Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo;
 - 3) Mendorong pembangunan fasilitas integrasi transportasi antarmoda dan penyediaan layanan angkutan pemadu moda di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta;
 - 4) Mendorong peningkatan layanan perkeretaapian, diantaranya: KRL Commuter Line Surakarta-Yogyakarta (rencana perpanjangan sampai ke Kutoarjo), KA Wisata Bhatara Kresna (Surakarta-Wonogiri), KA Bandara Adi Soemarmo (BIAS), KA Joglosemarkerto (loop) serta mendorong dan memfasilitasi perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta - Surabaya;
 - 5) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Surakarta -Sumberlawang via Sangiran dan Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri yang terkoneksi dengan Batik Solo Trans (BST) dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata (pengembangan program integrasi edutrip dengan Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata) serta perindustrian;
 - 6) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Sukoharjo dan Tawangmangu;
 - 7) Pemenuhan perlengkapan jalan provinsi pada ruas pendukung kawasan pariwisata Tawangmangu dan Geopark Wonogiri.
- b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
- 1) Mendorong pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) strategis regional dan nasional diantaranya: Sangiran, Umbul, Geopark Gunung Sewu, Tawangmangu, Candi Cetho-Sukuh;
 - 2) Fasilitasi penyelenggaraan event nasional dan internasional seni budaya, festival dan olahraga;
 - 3) Mengembangkan pola perjalanan yang mendukung perpanjangan tema wilayah pengembangan untuk mendukung pre dan post tour event;
 - 4) Menciptakan aktivitas wisata yang unik dalam MICE itineraries;
 - 5) Berkolaborasi dengan industri kreatif untuk menciptakan penawaran yang unik untuk mendukung kegiatan even yang berbeda dengan pesaing;
 - 6) Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan cagar budaya (*urban renewal* Kota Tua Surakarta, Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegaran) untuk peningkatan daya saing sektor pariwisata;
 - 7) Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya dan mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya/sejenisnya;
 - 8) Mendorong pembangunan dan pengembangan desa wisata;



- 9) Digitalisasi promosi pariwisata dan penguatan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi;
- 10) Pengembangan Geopark melalui jelajah Geopark Gunung Sewu, peningkatan kapasitas pengelolaan geopark, serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan geopark global;
- 11) Pendampingan pengembangan Geoheritage Klaten;
- 12) Peningkatan upaya promosi keberadaan Geopark Gunung Sewu sebagai DTW tingkat internasional diantaranya melalui: visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain.

2. Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki)

- a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor perindustrian, berupa:
 - 1) Pemantapan jaringan jalan Nasional pada ruas Boyolali-Surakarta-Palur-Sragen sampai dengan batas Jawa Timur;
 - 2) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Wonogiri - Perbatasan (DIY dan Jatim), Geyer-Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri;
 - 3) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi diantaranya: ruas jalan akses ke perbatasan provinsi (DIY dan Jatim); akses langsung ke jalan nasional (JJLS) dan penghubung antar jalan nasional (Boyolali -Klaten);
 - 4) Mendorong optimalisasi Dry-port Jebres dan Kalijambe Sragen.
- b. Peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, berupa:
 - 1) Pengembangan sentra industri hijau;
 - 2) Pengembangan ekspor produk unggulan;
 - 3) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
 - 4) Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
 - 5) Surakarta.

3. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, tebu daging, susu, dan perikanan budi daya)

- a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
 - 1) Fasilitasi sarpras pertanian (alsintan) pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 2) Peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan tebu di Sragen;
 - 3) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu);
 - 4) Penyediaan benih/bibit berkualitas;
 - 5) Penjaminan kualitas pakan ternak;





- 6) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - 7) Pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
 - 8) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
 - 9) Fasilitasi kampung tematik perikanan (Kampung Lele Boyolali, Kampung Patin Sragen);
 - 10) Pengembangan broodstock center ikan nila di Klaten;
 - 11) Mendorong pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di perkotaan (urban farming);
 - 12) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kepoh, Kwangsan dan Padakslorot Kabupaten Karanganyar; Klego Kabupaten Boyolali, Bapang dan Catgawen Kabupaten Sragen; Pundung dan Sidopangus Kabupaten Klaten;
 - 13) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian berupa peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung: Tirtosworo, Bangkan, Kedokan, Selur dan Salam (di Kabupaten Wonogiri) dan Embung Guworejo Sragen.
- b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
- 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
 - 2) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk;
 - 3) Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
 - 4) Kontak bisnis jalinan rantai pasok antara UMKM multiproduk dengan buyer dari pemerintah, BUMN/D, swasta;
 - 5) Pelatihan Ketrampilan Usaha Produktif berbasis potensi lokal;
 - 6) Penguatan Kelembagaan Koperasi bagi Kelompok Masyarakat Produktif;
 - 7) Magang Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Produk UMKM sektor susu;
 - 8) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
 - 9) Pemberdayaan Aspek Produksi Koperasi (FGD KUD di Solo Raya, Bulog dan MBG tentang Hilirisasi dan ketahanan Pangan);
 - 10) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Gemolong -Sragen - Karanganyar, Karangwuni - Perbatasan DIY.



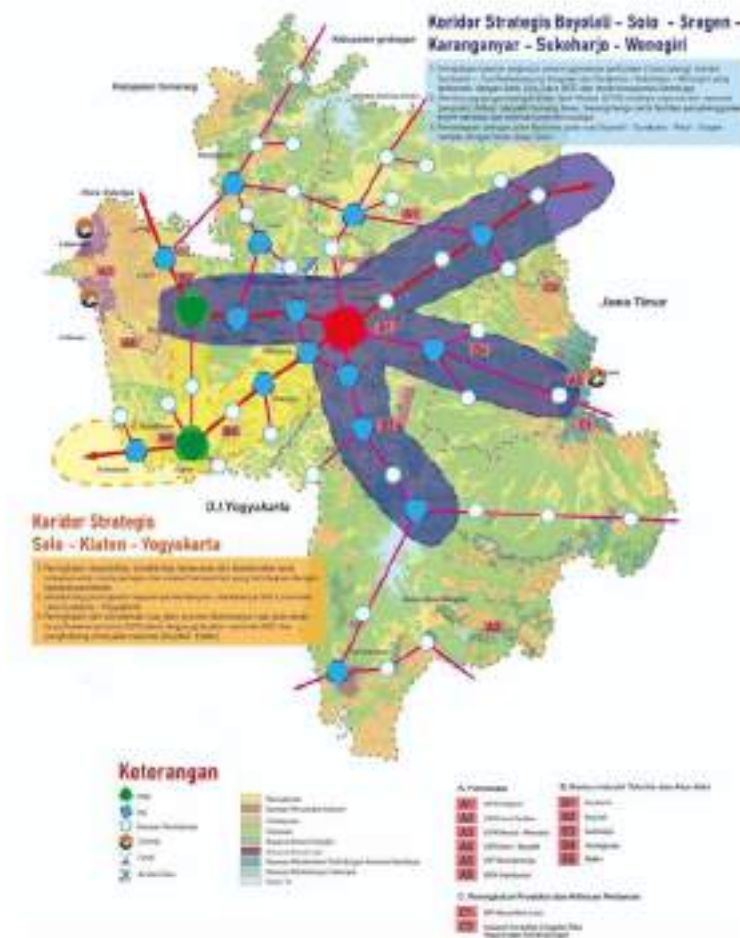
WP SUBOSUKAWONSRATEN

PROGRAM URUSAN PENGDERAH PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengembangan Solo-Bayu Sebagai MCI (Multi-Tier) dan Wisata Alam serta Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DII

PROGRAM STRATEGIS PENGDERAH PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Pengembangan Industri Lumburu - Bayu - Solok - Karanganyar - Klaten (Jalur dan Jala Jala)
2. Peningkatan produk dan hilirisasi sektor pertanian dan industri agribisnis, jasa, kesehatan, budaya, serta perbaikan daya daya dan modal



Sumber: Bappeda, 2025 (Hasil Analisis)

Gambar 3.3 Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten

Pengembangan wilayah Kabupaten Klaten lainnya diprioritaskan pada kebutuhan akan terbangunnya kawasan sport center dinilai penting jika dicermati melalui pendekatan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana serta spasial. Kabupaten Klaten telah memiliki 2 (dua) fasilitas olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu GOR Gelarsena dan Stadion Trikoyo. Namun secara kapasitas kedua fasilitas olahraga ini kurang memenuhi kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Klaten dengan jumlah penduduk tahun 2024 tercatat sebanyak 2024 1.302.648 jiwa. Selain itu, secara spasial kedua fasilitas olahraga tersebut persebarannya masih memusat di tengah wilayah kabupaten seperti yang dapat dicermati pada gambar di bawah.



Gambar 3.4 Peta Calon Lokasi Kawasan Sport Center dan Persebaran Fasilitas Olahraga Eksisting yang Dikelola Pemda

Kawasan Sport Center yang direncanakan dibangun di Desa Krakitan, Bayat sebelah barat laut Waduk Rowo Jombor merupakan langkah untuk pemerataan fasilitas dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat untuk berolahraga. Kawasan ini akan semakin memacu pengembangan kawasan di poros selatan Kabupaten Klaten. Pembangunan sport center ini juga akan menampung lebih banyak lagi masyarakat dibandingkan kedua fasilitas olahraga eksisting. Dengan ragam fasilitas sport center yang akan tersedia dan daya tampung yang direncanakan lebih besar dari fasilitas eksisting akan memberikan banyak opsi bagi masyarakat. Dari segi aksesibilitas calon lokasi ini cukup dekat dengan Stasiun Kereta Api Klaten. Dengan jarak ± 7 km dari Stasiun KA Klaten dapat ditempuh dengan mudah menggunakan kendaraan seperti motor dan mobil. Calon lokasi ini juga berjarak ± 40 km dari pusat Kota Solo dan ± 30 km dari pusat Kota Yogyakarta menjadikannya cukup strategis untuk mengadakan event-event olahraga dengan skala regional hingga nasional.

Kawasan Sport Center Kabupaten Klaten direncanakan dibangun di atas lahan seluas 6,68 ha. Kawasan ini akan dilengkapi dengan beragam fasilitas olahraga seperti jogging track, lapangan futsal, sepakbola, basket, voli, bulu tangkis, kolam renang, panjat tebing, hingga fasilitas lain yang mendukung seperti ruang pertemuan, gudang, asrama/*guest house*, masjid, dan kantin.

Secara umum, tahapan pengembangan sport center akan dilakukan dari tahun 2025-2030 yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan besar: Persiapan, Pembangunan Utama, dan Pembangunan Lanjutan. Penjelasan dari tiap-tiap tahapan adalah sebagai berikut:



1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini persiapan dilaksanakan di 2 (dua) tahun pertama pelaksanaan pengembangan kawasan. Penataan lahan dan persiapan aksesibilitas ke kawasan menjadi penting agar lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat dan penataan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada tahap ini aksesibilitas kawasan dapat dipastikan siap untuk publik.

2. Tahap Pembangunan Utama

Tahap kedua yang dilaksanakan pada 3 (tiga) tahun dari tahun 2027-2029 merupakan tahapan utama dalam pengembangan kawasan ini. Fasilitas olahraga seperti GOR utama, lapangan indoor untuk olahraga seperti basket, bulu tangkis, gymnastic, kolam renang, serta lapangan outdoor untuk olahraga seperti tenis dan panjat tebing dilaksanakan pada tahap ini. Pada tahap ini dipastikan juga amenities kawasan seperti listrik, toilet, masjid, dan ruang ganti dapat dipastikan siap digunakan untuk publik.

Pada tahap ini juga fasilitas yang telah selesai dibangun secara bertahap dapat mulai dibuka untuk keperluan publik meskipun masih terbatas.

3. Tahap Pembangunan Lanjutan

Tahap terakhir merupakan pembangunan sarana prasarana lain yang mendukung untuk kepentingan kegiatan di kawasan seperti kantin dan asrama/guesthouse. Kawasan sport center yang ke depan direncanakan untuk perhelatan event-event olahraga dan rekreasi lainnya penting untuk menyediakan amenities seperti asrama/guesthouse. Pada tahap ini pula dilaksanakan upaya mempercantik dan memperindah kawasan dengan penanaman pepohonan dan tanaman hiasan. Selain sebagai fungsi estetika, proses beautifikasi ini juga bermaksud untuk memberi kenyamanan dan magnet pengunjung untuk datang. Semua tahapan telah dilaksanakan maka kawasan dapat dilakukan peresmian dan dibuka secara total untuk publik.





Gambar 3.5 Sketsa Kawasan Sport Center Klaten

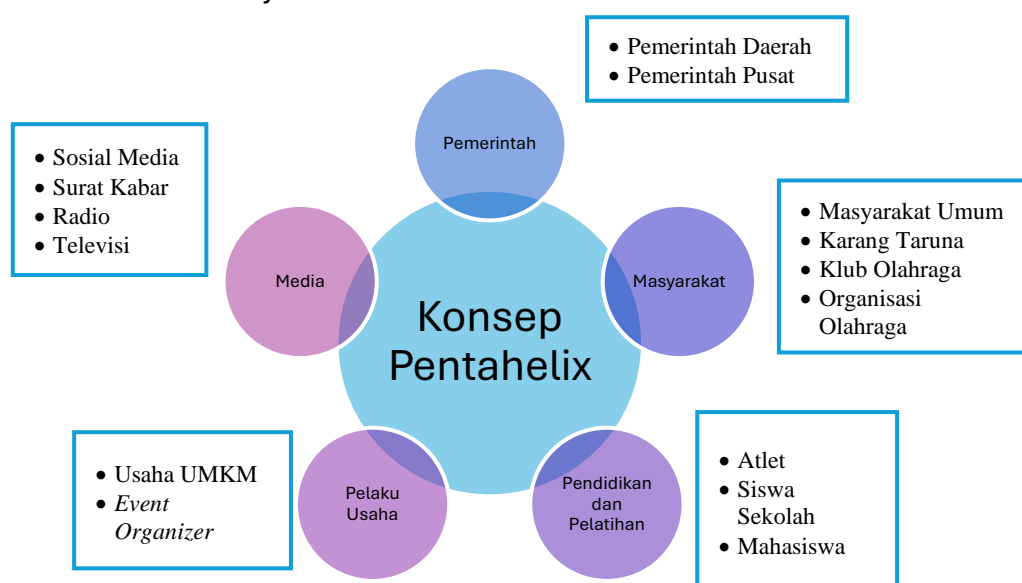
Seperti ruang publik lain, sport center juga memiliki fungsi atau peran dalam kawasan sekitarnya. Fungsi yang timbul dari adanya sport center dari segi rekreasi, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga bahkan perekonomian.

Dari segi rekreasi, sport center memberikan fasilitas olahraga yang beragam dan terjangkau untuk masyarakat serta memberikan pilihan masyarakat untuk meluangkan waktu di lokasi tersebut. Hadirnya sport center dari segi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang hilirnya menghasilkan atlet-atlet berprestasi dari Kabupaten Klaten. Diharapkan dengan meningkatnya atlet berprestasi yang lahir maka akan meningkatkan pula minat masyarakat untuk menggemari olahraga serta meningkatkan iklim olahraga kompetitif yang sportif. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia secara rutin hingga memupuk kebiasaan baik untuk gemar berolahraga dan memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Ketiga fungsi tersebut merupakan terjemahan dari salah satu misi RPJMD Klaten 2025-2029 yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian.”**

Dari segi sosial, sport center menjadi ruang publik tempat berkumpulnya masyarakat tanpa memandang batas-batas sosial dan ekonomi. Fasilitas olahraga yang beragam dan terjangkau, sehingga masyarakat berkumpul membangun gaya hidup yang lebih sehat serta dapat menjalin komunikasi dan jaringan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan sport center untuk menyelenggarakan event olahraga sebagai bentuk ekspresi dan bagian dari membangun iklim kompetitif di wilayah.



Dari segi perekonomian, sport center mampu menjadi pusat keramaian baru dengan menarik banyak masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah kabupaten karena merupakan ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Ditambah lagi dengan banyaknya peluang untuk terselenggaranya event yang tidak terbatas pada bidang olahraga saja tapi juga kesenian, kebudayaan, bahkan hiburan. Masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat juga dengan hadirnya kawasan sport center ini. Masyarakat sekitar sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berpartisipasi dengan menawarkan aneka produk dengan mendirikan stand ekonomi di sekitar tempat lokasi. Pendirian stand produk UMKM perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat agar tetap tertata rapi dan memudahkan pengunjung untuk bertransaksi. Ke depannya pendirian stand produk UMKM sendiri dapat diselenggarakan secara rutin dengan tetap memperhatikan kebersihan dan kenyamanan kawasan.



Gambar 3.6 Konsep Pentahelix Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Sport Center

Pelibatan dari unsur di luar pemerintahan sangat penting dilakukan mengingat kawasan akan selalu berkembang dan mengalami dinamika. Menggunakan konsep pentahelix ada 5 (lima) unsur yang dapat terlibat dalam pengembangan kawasan sport center.

Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai inisiator proyek ini dapat menggandeng unsur masyarakat yang berkecimpung dalam dunia olahraga seperti klub dan organisasi olahraga (KONI, NPC, dan sejenisnya) serta menggandeng karang taruna memantik adanya event olahraga dan kepemudaan yang positif. Dari segi pendidikan dan pelatihan, akan banyak atlet yang terwadahi dengan adanya fasilitas yang bervariasi serta memungkinkan terbentuknya wadah pelatihan atlet-atlet yang terpusat baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Harapan ke depan



atlet-atlet yang telah terfasilitasi dapat menyumbangkan prestasi di tingkat nasional maupun hingga tingkat internasional sehingga mengharumkan nama bangsa.

Peran media, terutama media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat umum dalam membangun kebiasaan berolahraga dirasakan cukup meningkat pada tahun-tahun terakhir. Ke depan dengan teknologi untuk berbagi pengalaman di media sosial terkait kenyamanan dan keamanan berolahraga di kawasan ini dapat menjadi pendongkrak bagi masyarakat lain untuk beramai-ramai berkunjung dan berolahraga.





Pemerintah
Kabupaten Klaten

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH





BAB IV PROGRAM PERANGKAT

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah Kabupaten Klaten memuat arah pembangunan yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah melalui kegiatan dan subkegiatan. Setiap program dilengkapi indikator serta target kinerja lima tahun ke depan yang didukung dengan rencana pembiayaan, sehingga menjadi acuan bagi masing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Renstra.

Program-program perangkat daerah Kabupaten Klaten juga berfungsi mendukung 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah dan 136 Program Unggulan Gubernur Jawa Tengah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi program delegasi ke dalam Renstra PD yang diselaraskan dengan nomenklatur subkegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penetapan target kinerja dan alokasi anggaran berlaku untuk periode 2026–2030. Adapun program Tahun 2025 telah tercantum dalam dokumen APBD TA 2025, sehingga tidak dimasukkan kembali ke dalam RPJMD, meskipun kinerjanya tetap menjadi tanggung jawab Kepala Daerah. Rencana program perangkat daerah periode 2025–2030 disusun sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kabupaten Klaten, tidak hanya untuk memastikan ketercapaian target pembangunan jangka menengah, tetapi juga untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah.

Secara khusus, program Tahun 2030 diposisikan sebagai pijakan utama penyusunan RKPD 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030–2034. Dengan demikian, capaian pembangunan Tahun 2030 memiliki peran strategis sebagai titik transisi sekaligus landasan keberlanjutan pembangunan daerah pada periode kepemimpinan berikutnya. Hal ini diharapkan mampu menjamin kesinambungan kebijakan, konsistensi program, serta keberlanjutan capaian kinerja pembangunan.

4.1.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.





1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pendidikan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini untuk mendukung ketercapaian misi ke-5 yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya dan responsif gender, program ini juga diarahkan untuk menurunkan angka anak tidak sekolah sebagai wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, dimana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta didukung peningkatan budaya membaca dan pengembangan kerjasama inovasi daerah.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan muatan lokal dalam kegiatan belajar mengajar baik ditingkat PAUD, SD maupun SMP. Muatan lokal diajarkan ke siswa agar mengetahui dan memahami kearifan lokal yang ada di daerah, sehingga budaya dan kearifan lokal dapat dilestarikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemenuhan dan ketersediaan guru secara ideal serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan Penguatan kualitas pembelajaran melalui integrasi pendekatan literasi dan numerasi dalam proses pembelajaran, menciptakan pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpihak pada peserta didik.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan untuk pengembangan dan pelestarian bahasa dan sastra, utamanya bahasa dan sastra daerah.

b. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten, yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak,





pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat.

- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program ini untuk mendukung pemenuhan dan pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan dasar.
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program ini diarahkan untuk pengawasan makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat serta peningkatan pelayanan kefarmasian agar sesuai dengan standart (ketentuan).
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Program ini diarahkan pada peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa/kelurahan disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten dengan meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap. Program ini lebih pada manajemen pengelolaan sumber daya air sehingga dalam pemanfaatannya akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air minum yang layak dan aman untuk masyarakat.
- 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program ini diarahkan untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten salah satunya adalah dengan penyediaan sistem pengelolaan persampahan secara terpadu berupa TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang sesuai standart dan berwawasan lingkungan.
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak dan aman untuk masyarakat.
- 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini untuk mendukung program prioritas Bupati Klaten, dengan meningkatkan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan



bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap.

- 6) Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini digunakan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan bangunan gedung milik daerah.
- 7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungan yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- 8) Program Penyelenggaraan Jalan;
Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten yang dalam pelaksanaannya mendapatkan perhatian, diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten. Diharapkan dengan infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah.
- 9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Pelaksanaan program ini dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga kerja di bidang jasa konstruksi dengan melakukan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi sesuai kewenangan daerah.
- 10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini ditujukan untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Perumahan
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pemenuhan indikator SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 2) Program Kawasan Permukiman
Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten yang diarahkan pada peningkatan dan penanganan kawasan kumuh, utamanya pada kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.
- 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Pelaksanaan program ini untuk rehabilitasi dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang berada diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha.
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Program ini digunakan untuk memfasilitasi penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan mendorong pengembang agar segera





menyerahkan PSU Perumahan yang dibangun kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program ini diarahkan pada pembinaan pengembang perumahan dan kawasan permukiman.

e. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program ini ditujukan untuk pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
- 2) Program Penanggulangan Bencana
Pelaksanaan program ini mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten, dengan harapan masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami. Program ini dimaksudkan untuk RB inklusif dan pembentukan desa tangguh bencana (Destana). Selain itu, program ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana.
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Program ini diarahkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebakaran.

f. Sosial

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan sosial tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten dalam penanggulangan kemiskinan, melalui Pusat Layanan Kesejahteraan Anak Integratif (PLKSAI); Rumah Singgah (Rusi) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
- 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar.





- 4) Program Penanganan Bencana
Program ini ditujukan pada pemenuhan sandang dan pangan untuk korban bencana.
- 5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pengelolaan taman makam pahlawan sesuai standart.

2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan tenaga kerja tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah, diharapkan seluruh kegiatan yang ada pada dokumen perencanaan tenaga kerja daerah dapat terlaksana.
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha.
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diarahkan pada penempatan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja.
- 4) Program Hubungan Industrial
Program ini ditujukan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara tenaga kerja (buruh) dan perusahaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diarahkan pada implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, serta implementasi dari struktur Pokja PUG di Perangkat Daerah.
- 2) Program Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga



- Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan data pilah gender dan anak yang ada disetiap Perangkat Daerah, dengan data pilah diharapkan perencanaan yang disusun lebih responsif gender.
 - 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diarahkan pada pelaksanaan kabupaten layak anak sampai tingkat kecamatan.
 - 6) Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diarahkan untuk memberikan perlindungan dan penanganan anak yang menjadi korban kekerasan.

c. Pangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Program ini diarahkan pada penyediaan bahan pangan pada lumbung pangan yang menjadi cadangan pangan. Selain itu juga merupakan program unggulan Bupati Klaten dengan pengembangan lumbung pangan.
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program ini diarahkan pada Bimbingan pengembangan Kelembagaan distribusi pangan : LPM / Gapoktan, Bantuan / stimulan Tunda Jual gabah untuk dikelola sebagai modal usaha kelompok
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
Pelaksanaan program ini diarahkan pada penanganan desa rawan pangan baik yang disebabkan karena akses memperoleh pangan yang sulit maupun karena bencana.
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
Program ini ditujukan untuk pengawasan pangan, terutama pangan segar yang beredar di pasar, hal ini dilakukan untuk memastikan setiap bahan pangan yang beredar layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

d. Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanahan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Program ini digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan di masyarakat, mengingat banyak masyarakat di Kabupaten Klaten yang hidup dari hasil bercocok tanam (petani).





- 2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian ganti rugi tanah untuk pembangunan guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 3) Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Program ini diarahkan untuk memfasilitasi pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah.
- 4) Program Penatagunaan Tanah.
Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen penatagunaan tanah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pertanahan.

e. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan lingkungan hidup tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada penyediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkualitas.
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Program ini dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, dengan melakukan pemantauan kualitas air dan udara.
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Program ini ditujukan untuk pengelolaan dan pemeliharaan RTH, yang merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten di bidang lingkungan hidup dengan penyediaan ruang terbuka hijau hingga tingkat RW serta optimalisasi fungsi RTH dan profil kehati Kabupaten Klaten, rencana induk pengelolaan kehati Kabupaten Klaten.
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Program ini diarahkan pada pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan limbah B3, agar tidak mencemari lingkungan disekitarnya.
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan lingkungan dan izin PPLH.
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat





Program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada tokoh/ lembaga masyarakat/ sekolah/ dunia usaha yang peduli terhadap pelestarian lingkungan.

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan untuk memastikan setiap aduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan hidup ditindaklanjuti dan ditangani.

9) Program Pengelolaan Persampahan

Program merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten dengan fokus pada Pengelolaan persampahan (TPS) dengan budidaya maggot dan Pengembangan TPS Desa/ Kelurahan.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pendaftaran Penduduk

Pelaksanaan program ini ditujukan pada pelayanan pendaftaran penduduk.

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah.

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada penyusunan profil kependudukan.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kerjasama antar desa.

2) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan untuk mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten, yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Pelaksanaan program ini mengarah pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.

4) Program Penataan Desa





Program ini diarahkan untuk peningkatan sarpras dan infrastruktur desa dan dalam rangka mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada sinkronisasi kebijakan perencanaan dan pengendalian penduduk.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada penurunan masyarakat yang tidak terlayani dalam pemenuhan alat kontrasepsi.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan pembinaan keluarga.

i. Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perhubungan tahun 2025-2029 adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada penyelenggaraan dan pemenuhan pelayanan lalu lintas angkutan jalan, guna meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Klaten.

j. Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan komunikasi dan informatika tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi publik terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikemas secara menarik.

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mendukung ketercapaian Klaten Smart City dengan menyediakan pelayanan publik secara online dan menyiapkan akses internet di setiap Perangkat Daerah.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pengawasan dan pemeriksaan terhadap keberadaan koperasi di Kabupaten Klaten.

2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian





Pelaksanaan program ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan mendukung ketercapaian program unggulan Bupati Klaten yang mengarah pada Optimalisasi Show room produksi UMKM, peningkatan kapasitas kelembagaan Kluster UKM serta digitalisasi produk UKM, Asistensi Usaha mikro berbasis Kluster.

4) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro

l. Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penanaman modal tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan iklim investasi untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kabupaten Klaten.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada promosi investasi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Klaten.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini merupakan salah satu program unggulan Bupati Klaten guna memberikan pelayanan yang prima dalam perizinan penanaman modal, diarahkan pada pemenuhan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Program ini diarahkan untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memberikan laporan penanaman modal yang telah dilakukan.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pelaksanaan program ini adalah untuk menyediakan dan mengelola data perizinan dan non perizinan serta sistem informasi penanaman modal,

m. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk mengembangkan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pelatihan dan pembinaan pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan





Program ini ditujukan untuk pembinaan terhadap atlet yang dilakukan secara kontinyu.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan penguatan pemuda dalam organisasi kepramukaan

n. Statistik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan statistik tahun 2025-2029 adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pelaksanaan program ini fokus pada penyediaan data statistik sektoral.

o. Persandian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan persandian tahun 2025-2029 adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini ditujukan untuk pengamanan Informasi dan komunikasi Perangkat Daerah.

p. Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kebudayaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan untuk mengembangkan kebudayaan daerah agar tetap lestari dan dikenal oleh masyarakat.

2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kesenian tradisional di Kabupaten Klaten melalui pembinaan terhadap pelaku kesenian.

3) Program Pembinaan Sejarah

Program ini dilaksanakan guna mendukung program unggulan Bupati Klaten untuk museum daerah taman budaya dengan fokus pada pelestarian dan pembinaan sejarah lokal.

4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk melestarikan dan mengelola benda peninggalan, situs dan kawasan cagar budaya yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini merupakan salah satu program prioritas Bupati Klaten dalam pembangunan museum dan taman budaya, juga untuk memwadahi pengelolaan dan perlindungan terhadap koleksi benda sejarah/ warisan budaya.





q. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perpustakaan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Pelaksanaan program ini dilakukan guna mendukung pelatihan komputer untuk masyarakat kurang mampu dan program Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku.

2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Naskah Kuno

Program ini diarahkan untuk mendukung pelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara

r. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kearsipan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini dilakukan dalam rangka pembinaan dalam pengelolaan arsip sesuai standar nasional kearsipan.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini digunakan untuk meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip-arsip penting.

3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini ditujukan pada masyarakat dalam kemudahan akses penggunaan arsip yang bersifat tertutup

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

a. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan program ini ditujukan memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat dan menjaga keberlanjutan kelestarian lingkungan perairan.

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal daerah, pembinaan perikanan budidaya untuk meningkatkan produksi ikan dan tingkat konsumsi ikan serta sebagai daya tarik wisata.





3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini ditujukan untuk mendukung program hilirisasi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan agar dapat memberikan nilai tambah.

b. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pariwisata tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini merupakan salah satu program yang fokus pada peningkatan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan sehingga lebih banyak membelanjakan uangnya di Klaten dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini untuk mendukung promosi dan pemasaran destinasi wisata baik di dalam negeri maupun luar negeri guna meningkatkan kunjungan wisatawan.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini ditujukan untuk pengembangan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini ditujukan untuk pengembangan dan peningkatan keterampilan SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan pelaku ekonomi kreatif.

c. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini untuk mendukung pengembangan padi rojolele varietas srinar dan srinuk, peningkatan tanaman perkebunan dan hortikultura dengan bibit unggul serta budidaya pengembangan pertanian organik di Kabupaten Klaten. Program ini merupakan program prioritas Bupati

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini merupakan salah satu pendukung program unggulan Bupati Klaten dalam mengembangkan ternak unggul kambing serta diarahkan pada diseminasi dan penegakan Perda LP2B. Selain itu dalam program ini juga diarahkan untuk pengelolaan jaringan irigasi sesuai kewenangan.





- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini dilaksanakan untuk pengendalian, pencegahan, pemberantasan dan penanganan Penyakit Hewan Menular (PHM) dan zoonosis, dan pengawasan produk hewan.
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi bencana pertanian yang dinilai akan memberi dampak pada usaha pertanian.
- 5) Program Penyuluhan Pertanian
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan pertanian.

d. Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perdagangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Pelaksanaan program ini diarahkan untuk mengembangkan dan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha untuk memperoleh rekomendasi izin sesuai dengan peraturan perundangan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat/tradisional dengan melakukan revitalisasi pasar dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Pelaksanaan program ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) di masyarakat serta menjaga ketersediaan dan pemenuhan pupuk bagi petani.
- 4) Program Pengembangan Ekspor
Program untuk meningkatkan daya saing produk industri daerah, yang diarahkan pada jenis produk daerah yang mampu diekspor untuk meningkatkan nilai ekspor daerah dengan indikator kinerja jumlah komoditas yang mampu ekspor.
- 5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Pelaksanaan program ini untuk memberikan pelayanan pengukuran dan perlindungan konsumen.
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri
Program ini digunakan sebagai wadah promosi dan pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Klaten.





e. Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perindustrian tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap Industri Kecil Menengah.
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi perizinan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- 3) Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional
Pelaksanaan pada program ini mengarah pada fasilitasi database IKM pada Sistem Industri Nasional (SIINas)

f. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan transmigrasi tahun 2025-2029 adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Program ini dimaksudkan untuk memberangkatkan dan membekali keterampilan bagi calon transmigran yang akan diberangkatkan menuju wilayah transmigrasi.

4. Urusan Penunjang Pemerintah

Nomenklatur program yang akan digunakan di urusan penunjang pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan program ini diarahkan untuk menunjang pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta penataan organisasi.
- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan pemberian bantuan kesejahteraan rakyat, bantuan sosial kepada masyarakat, pemberian bantuan hukum kepada OPD dan desa yang ditimpa kasus hukum serta pembinaan tertib administrasi bagi kecamatan dan kelurahan.
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan
Program ini ditujukan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi untuk kegiatan perekonomian dan pembangunan yang menjadi kewenangan sekretariat daerah. Selain itu juga untuk memberikan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro yang disalurkan melalui bank yang telah ditunjuk.





b. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memberikan dukungan pelayanan kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

c. Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perencanaan pembangunan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundangan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan program ini diarahkan guna mendukung keterpaduan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembanguann daerah agar semua target kinerja pembangunan dapat tercapai.

d. Keuangan Daerah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan keuangan daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan program ini ditujukan dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal.
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini ditujukan untuk pengelolaan aset daerah yang optimal.
- 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian target pajak daerah.

e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Kepegawaian Daerah
Program ini ditujukan agar pengelolaan manajemen kepegawaian daerah semakin baik dan professional guna mendukung pencapaian sistem merit.
- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan program ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas SDM yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhhlak).





f. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penelitian dan pengembangan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini ditujukan untuk pengembangan kajian potensi unggulan daerah dan pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

2) Program Riset Dan Inovasi Daerah

Program ini ditujukan untuk mendorong kegiatan riset dan inovasi di bidang pemerintahan; sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah, juga untuk mendukung program prioritas bupati dalam perbaikan varietas durian khas Klaten.

g. Pengawasan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengawasan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah secara efektif.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk mencapai indikator Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah dan Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus.

h. Kewilayahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kewilayahan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk memfasilitasi pelayanan publik kepada masyarakat di kecamatan

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat.

3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan dari program ini adalah untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani.





5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan fasilitasi bagi aparatur pemerintah desa.

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Pelaksanaan program ini lebih pada pendidikan politik masyarakat dan peningkatan peran partai politik melalui pembinaan yang dilakukan setiap tahun.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang ada di Kabupaten Klaten

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya

Pelaksanaan program ini diarahkan pada pembinaan kerukunan umat beragama dan pelaksanaan P4GN.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik

Program ini dilaksanakan guna meningkatkan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik dengan melakukan deteksi dini potensi konflik.

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029 terperinci disajikan dalam tabel berikut.





Tabel 4.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dan Pendanaan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030

KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						909.010.714.000		979.559.021.398		976.080.847.385		978.093.808.913		983.984.388.167	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						778.253.044.200		786.866.355.398		777.736.947.385		777.355.869.913		772.340.207.167	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,60	83,70	83,80		83,87		84,90		85,10		85,15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80,45	80,70	81,10		81,75		82,15		82,70		83,00		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						123.108.669.800		176.250.551.000		180.815.955.000		182.114.513.000		189.658.431.000	
	Meningkatnya Partisipasi Usia Sekolah	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	54,65	56,60	56,90		57,00		57,85		57,95		58,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		Persentase SD berakreditasi minimal B	%	98,59	98,60	98,80		98,95		99,10		99,25		99,40		
		Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	87,93	87,93	88,10		88,70		88,95		89,40		90,10		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,30	98,38	98,49		98,51		98,58		98,60		98,67		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	89,77	91,17	92,58		93,98		95,38		96,78		98,18		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,08	99,12	99,13		99,21		99,26		99,34		99,39		



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	10,29	11,05	11,82		12,58		13,34		14,10		14,87		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						394.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum muatan lokal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						7.225.000.000		15.212.115.000		16.097.945.000		16.993.426.000		20.255.750.000	
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru PAUD	Indeks	-	-	0,39		0,40		0,42		0,43		0,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		Indeks Pemerataan Guru SD	Indeks	-	-	0,45		0,46		0,49		0,52		0,58		
		Indeks Pemerataan Guru SMP	Indeks	-	-	0,44		0,48		0,51		0,55		0,60		
		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	%	52,98	52,98	52,98		53,90		54,25		54,90		55,55		
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	%	-	-	0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						30.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000	
	Meningkatnya perlindungan dan kemajuan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						458.670.571.489		433.094.066.657		441.844.835.165		453.314.391.242		456.258.692.884	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						366.843.074.217		345.459.430.779		351.304.386.489		360.783.335.296		356.573.786.605	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA															
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,90	88,00	88,50		89,00		89,00		89,20		89,30		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	75,15	75,20	75,25		75,40		75,55		75,70		75,85		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						88.073.747.110		84.192.230.878		87.065.398.676		89.032.480.946		96.157.686.279	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	13,73	14,15	14,15		14,10		14,05		14,00		13,95		
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	109,20	97,00	97,00		98,00		99,00		99,00		99,00		
		Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	61,88	61,90	62,30		62,50		62,80		63,00		63,50		
		Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	%	47,00	50,77	51,53		51,53		51,53		51,53		51,53		
		Persentase keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten	%	81,62	81,62	81,70		81,80		81,90		82,00		82,10		
		Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	%	5,00	25,00	30,00		50,00		60,00		70,00		80,00		
		Persentase Rumah Sakit Bagas Waras dalam memenuhi ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan /SPA sesuai standar	%	59,00	59,00	60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		
		Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	%	99,53	99,53	99,80		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.132.837.000		1.330.000.000		1.350.000.000		1.360.000.000		1.375.000.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	26,00	32,00	38,00		41,00		44,00		47,00		50,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	50,00	54,00	60,00		64,00		68,00		70,00		72,00		
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	2,90	3,00	3,01		3,02		3,03		3,04		3,05		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						766.895.000		712.405.000		725.050.000		738.575.000		752.220.000	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	%	50,00	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.854.018.162		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	0,00	30,00	50,00		80,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	%	98,78	98,00	98,00		98,00		98,00		99,00		99,00		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						210.125.135.200		223.132.163.767		226.452.174.491		224.514.976.765		257.309.587.311	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						32.940.358.200		26.853.069.767		27.111.625.491		27.514.256.765		28.937.458.311	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,00	87,45	88,00		88,00		87,70		87,80		87,90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,00		81,00		81,10		81,15		81,20		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						15.600.000.000		24.731.963.000		25.834.975.000		27.450.003.000		31.512.160.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,34	0,34	0,36		0,37		0,38		0,39		0,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						1.670.000.000		2.280.598.000		1.827.824.000		1.875.564.000		2.049.485.000	
	Meningkatnya akses air minum yang layak bagi masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	94,00	94,29	95,00		96,00		96,42		96,96		97,49		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						1.251.061.000		3.636.206.000		3.144.447.000		2.152.778.000		2.183.126.000	
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						4.320.000.000		3.646.832.000		3.867.461.000		4.090.494.000		4.903.024.000	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,00	2,00	2,00		2,00		2,99		3,56		4,38		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1.630.000.000		2.675.693.000		2.777.071.000		2.879.553.000		3.252.905.000	
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	62,62	62,62	63,03		63,18		63,34		63,49		63,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN						41.517.242.000		41.780.634.000		39.461.328.000		34.160.332.000		40.349.973.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	BANGUNAN GEDUNG															
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung perkantoran pemerintah yang terbangun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						1.270.000.000		7.324.702.000		7.465.344.000		3.607.518.000		4.125.472.000	
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	20,00	27,00	27,00		29,00		31,00		33,00		35,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						106.167.057.000		108.537.128.000		113.196.009.000		118.916.539.000		137.756.999.000	
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan kondisi baik	%	48,00	48,06	48,13		48,20		48,27		48,34		48,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						529.295.000		250.777.000		265.949.000		281.286.000		337.161.000	
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						3.230.122.000		1.414.561.000		1.500.141.000		1.586.653.000		1.901.824.000	
	Meningkatnya keteraturan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase rencana tata ruang yang disusun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						17.295.055.000		16.338.885.207		16.886.548.600		17.479.431.069		19.656.811.388	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.238.953.000		9.717.783.207		9.748.446.600		9.996.829.069		11.290.709.388	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,00	85,00	85,00		85,05		85,10		85,15		85,20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,50		81,75		82,00		82,25		82,50		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						1.025.500.000		522.000.000		524.000.000		528.500.000		1.002.000.000	
	Terpenuhinya kebutuhan rumah layak bagi korban bencana dan masyarakat yang terdampak program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						795.400.000		410.000.000		775.000.000		785.000.000		1.195.000.000	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	97,63	98,83	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						3.534.862.000		3.919.102.000		4.069.102.000		4.399.102.000		4.399.102.000	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penanganan permukiman kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	97,63	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						1.671.500.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000		1.750.000.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Sasaran: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum di kawasan permukiman	Persentase perumahan yg dilengkapi prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	52,76	52,76	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Persentase PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan	%	24,52	24,52	37,73		47,17		56,60		66,04		75,47		
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						28.840.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan	%	0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						22.721.518.980		19.313.460.736		19.829.623.191		20.412.604.093		22.517.558.720	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.428.690.149		11.218.736.736		11.284.768.191		11.431.588.093		11.968.808.720	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,14	88,22	88,30		88,43		88,55		88,68		88,80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	68,07	68,21	68,37		68,57		68,92		69,09		69,62		



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.211.343.924		2.724.691.000		2.910.439.000		3.079.337.000		3.673.408.000	
	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenram	Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						4.271.571.051		3.554.293.000		3.708.825.000		3.865.041.000		4.434.149.000	
	Meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	52,00	52,00	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						1.809.913.856		1.815.740.000		1.925.591.000		2.036.638.000		2.441.193.000	
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran dan non-	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	kebakaran secara efektif dan responsif	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15,97	15,20	15,20		15,20		15,10		15,00		15,00		Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						20.782.604.200		17.285.249.527		17.661.430.143		18.154.419.205		19.201.346.637	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.590.204.200		8.078.549.527		8.215.710.143		8.383.699.205		8.880.626.637	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,71	90,71	90,71		91,50		92,00		92,50		93,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80,30	80,30	80,30		80,60		80,90		81,20		81,50		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						4.910.000.000		3.090.000.000		3.135.000.000		3.305.000.000		3.305.000.000	
	Meningkatnya keberdayaan kelompok rentan dalam kehidupan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	93,00	94,00	94,00		95,00		96,00		97,00		98,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						4.287.400.000		3.474.900.000		3.643.920.000		3.648.920.000		3.658.920.000	
	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, dan PPKS lainnya di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta PPKS lainnya selain HIV/AIDS dan Napza di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	70,00	70,00	70,00		72,00		74,00		76,00		78,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						1.027.500.000		1.986.800.000		1.986.800.000		2.111.800.000		2.411.800.000	
	Meningkatnya akses perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	84,23	85,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						792.500.000		480.000.000		480.000.000		505.000.000		670.000.000	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						175.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000		275.000.000	
	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.317.119.000		7.328.971.000		8.011.688.000		8.695.045.000		9.750.981.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						20.000.000		10.000.000		10.000.000		100.000.000		15.000.000	
	Meningkatnya akurasi dan pemanfaatan data perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.420.000.000		3.601.981.000		4.131.767.000		4.549.956.000		5.130.650.000	
	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	23,26	15,00	23,27		23,28		23,29		23,30		23,31		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						3.850.000.000		3.229.790.000		3.364.690.000		3.506.060.000		4.007.867.000	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	85,37	24,00	85,84		86,34		86,84		87,34		87,84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						1.027.119.000		487.200.000		505.231.000		539.029.000		597.464.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah	Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.059.312.000		1.525.000.000		1.525.000.000		1.615.000.000		1.700.000.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						170.000.000		170.000.000		170.000.000		170.000.000		185.000.000	
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	2,16	2,20	2,20		2,30		2,40		2,50		2,60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						190.000.000		220.000.000		220.000.000		230.000.000		245.000.000	
	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dari kekerasan dan diskriminasi	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						365.900.000		375.000.000		375.000.000		445.000.000		485.000.000	
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase kecamatan yang mempunyai puspa aktif	%	34,62	38,46	38,46		42,31		46,15		50,00		53,85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Tersedianya data gender dan anak yang akurat dan terintegrasi	Persentase keterisian data pilah gender dan anak kabupaten pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA)	%	88,00	88,00	88,00		90,00		92,00		94,00		96,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000		470.000.000	
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase desa dan kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak	%	12,47	18,70	18,70		24,94		31,17		37,41		49,88		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						813.412.000		240.000.000		240.000.000		250.000.000		265.000.000	
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						39.747.099.200		36.926.863.745		36.763.739.277		37.123.143.319		38.267.426.252	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						37.707.099.200		34.536.863.745		34.168.739.277		34.401.143.319		35.292.426.252	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,94	83,00	83,00		83,20		83,50		83,80		84,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	72,75	72,76	72,77		72,78		72,79		73,00		73,01		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						875.000.000		900.000.000		910.000.000		950.000.000		1.000.000.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	27,22	30,22	35,22		45,22	900.000.000	60,22		75,22		95,22		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						835.000.000		1.040.000.000		1.100.000.000		1.122.000.000		1.185.000.000	
	Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92,77	92,77	93,00		93,30		93,50		93,75		94,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						255.000.000		375.000.000		505.000.000		570.000.000		690.000.000	
	Menurunnya kerawanan pangan dan meningkatnya akses pangan bagi masyarakat rentan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	15,38	16,00	18,00		18,00		20,00		21,00		23,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						75.000.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	95,09	83,00	94,50		95,00		95,50		96,00		96,50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						210.000.000		85.000.000		105.000.000		115.000.000		125.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						45.000.000		22.500.000		35.000.000		37.500.000		40.000.000	
	Tersebaikannya konflik dan kepastian status hukum atas tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	



KODE	URUSAN PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Terselesainya pengadaan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu dan terpenuhinya hak ganti kerugian masyarakat	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						75.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000	
	Terfasilitasinya pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah serta terselenggaranya redistribusi tanah dan penyelesaian ganti kerugian secara tepat dan tertib administrasi	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya	%	57,50	57,50	72,50		74,00		75,00		76,00		77,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						65.000.000		17.500.000		20.000.000		22.500.000		25.000.000	
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						46.455.923.200		34.472.442.864		38.282.739.363		41.183.685.959		42.440.641.698	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.362.493.200		13.446.555.864		13.488.547.363		13.512.094.959		13.755.600.698	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95,70	92,61	95,71		95,72		95,73		95,74		95,74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	68,70	68,70	68,80		68,85		68,90		69,00		69,10		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						144.354.000		110.325.000		363.975.000		117.665.000		131.106.000	